



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 571 /HK/KPTS/2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Siak ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80)
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

- a. menyusun rencana jangka menengah;
- b. menyusun rencana kinerja tahunan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja
- f. menyusun laporan kinerja; dan
- g. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2016**



INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021

- 1 Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
- 2 Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 2 Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 3 Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
 4 Penyusunan laporan hasil pengawasan
 5 Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten
 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- 3 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	ALASAN / SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pengawasan Internal Yang Berkualiatas	- Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prop Riau Terhadap Tingkat Maturitas SPIP
2	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	- Persentase Nilai Temuan TGR yang selesai ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan yang berindikasi TGR yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Nilai Temuan}} \times 100\%$
		- Persentase temuan administrasi yang selesai ditindaklanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan yang bersifat administrasi yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Nilai Temuan}} \times 100\%$
		- Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kasus Pengaduan yang Masuk Ke Inspektorat}} \times 100\%$
		- Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area Perubahan Penguatan Pengawasan	Nilai	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	Nilai	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah Keseluruhan OPD di Lingkungan Pemda Siak}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	- Tingkat kapabilitas APIP	Level	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prop Riau Terhadap Tingkat Kapabilitas APIP

